

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Permasalahan lingkungan menjadi salah satu permasalahan yang menjadi topik yang dibicarakan di seluruh dunia. Adanya polusi, perubahan iklim, hingga hilangnya keanekaragaman hayati menjadi pembahasan di forum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) hingga akhirnya memunculkan *United Nations Environment Programme* (UNEP) sebagai badan yang mempromosikan, membantu, serta mendorong negara untuk memperhatikan kelestarian lingkungan .

Saat ini ditemukan fakta bahwa kehidupan manusia mulai tidak lagi harmonis dengan alam, hal ini dibuktikan dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan semakin rendah. Dari data yang di ambil dari penelitian Travis P. Wagner (Wagner, 2017, p. 13) memperkirakan masyarakat dunia membuang 5 triliun sampah kantong plastik setiap tahunnya, sedangkan di Indonesia menyatakan rata-rata ada 182,7 miliar kantong plastik digunakan di Indonesia setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, sampah plastik di Indonesia mencapai 1.278.900 ton per tahunnya, data lain bahkan menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu penyumbang terbesar sampah di dunia setelah China (Jambeck et al., 2015, p. 768). Namun dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menunjukkan adanya peningkatan impor sampah plastik di Indonesia sebanyak 141 persen hingga menyentuh angka 283 ton (Shafira et al., 2022, pp. 1–19).

Polusi yang senantiasa meningkat terjadi karena kesadaran masyarakat untuk bersinergi dengan alam mulai melemah. Hal sederhana seperti memilah sampah menjadi hal yang belum diterapkan sepenuhnya oleh masyarakat di Indonesia, sehingga produsen pengolah plastik memilih mengimpor plastik yang sudah terpilah sebagai bahan baku dari pada mengandalkan sampah yang ada di indonesia. Fakta lain rendahnya kesadaran dari masyarakat adalah temuan pemanfaatan sampah impor yang seharusnya untuk bahan produksi digunakan juga oleh masyarakat sebagai bahan bakar industri kecil di Jawa Timur karena hanya 60% dari sampah impor tersebut yang bisa di olah pabrik sebagai bahan baku

sehingga 40% sisanya di beli oleh industri kecil untuk bahan bakar. Hal ini berbahaya karena memicu terlepasnya senyawa *dioksin* dan *furan*, keduanya merupakan bahan *karsinogen* pendorong kanker paru-paru. Hal itu tentu buruk bagi udara di Jawa Timur. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190712174254-20-411673/protes-sampah-impor-massa-di-jatim-geruduk-konjen-amerika>.

Dari data yang diperoleh dari sistem pengolahan sampah kementerian lingkungan hidup di kota madiun diketahui bahwa plastik menjadi sampah ketiga terbesar yang dihasilkan oleh warga kota madiun, dan buruknya sampah tersebut masih tercampur dengan sampah-sampah lain termasuk sampah organik seperti pada gambar 1.1 berikut ini (Observasi, 2021). Hal ini membuktikan kesadaran masyarakat untuk peduli dengan lingkungan rendah, bahkan hal sederhana seperti memilah sampah masih kurang untuk di utamakan.



Gambar 1.1 Pemulung memilah sampah plastik di TPA Kota Madiun (di olah dari data penelitian 2024)

Pentingnya menumbuhkan kesadaran pengelolaan lingkungan ini membuat walikota madiun mendorong sekolah-sekolah di kota Madiun untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan bagi siswanya, salah satunya dengan membuat bank sampah di setiap sekolah termasuk di setiap SMP. Namun dari data yang diolah peneliti melalui observasi diketahui bahwa meski ada bank sampah di sekolah siswa hanya mau menyetorkan sampah-sampah plastik ke bank sampah apabila ada perintah dari guru / sekolah, jika tidak maka mereka lebih memilih membuangnya di tempat sampah yang paling dekat dengan posisi mereka. Selain itu meski melihat temanya membuang sampah tidak pada tempat yang tepat, siswa tidak merasa wajib untuk

mengingatkan. Fakta lain yang ditemukan saat observasi yakni hampir semua siswa yang membeli makanan di kantin sekolah memilih menggunakan bungkus plastik untuk membungkus makanan/minuman mereka dari pada menggunakan piring/ gelas yang disediakan. Sehingga dari hal ini diketahui bahwa kompetensi *Ecological citizenship* yang di dalamnya terdiri dari partisipasi siswa, kesadaran, dan tanggung jawab mengenai kesadaran lingkungan siswa masih perlu di tingkatkan kembali (Karatekin, K., & Uysal, 2018, p. 104).

Jika ditinjau dari sisi filosofis maka perilaku siswa yang cenderung mengakibatkan kerusakan alam terjadi karena adanya etika *Antroposentrisme*. Etika *Antroposentrisme* muncul dari hasil pemikiran Aristotle dan para filsuf lain seperti seperti Thomas Aquinas, Rene Descartes, dan Immanuel Kant. Dalam pemikirannya, Aristotle beranggapan bahwa semua yang ada di dunia, binatang maupun tumbuhan diciptakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia (Gansmo Jakobsen, 2017, p. 184; Kopnina et al., 2018, p. 109; Lewis, 2018, p. 250; Quinn et al., 2016a, p. 893). Bahkan dalam pemikiran tersebut terdapat tingkatan dalam semua ciptaan Tuhan di bumi, dan manusia menjadi pusatnya. Maka dari itu manusia bebas menggunakan semua ciptaan Tuhan yang ada di bumi untuk kepentingannya, termasuk alam, tumbuhan, dan hewan. Penganut paham ini beranggapan memanfaatkan semua yang ada di bumi untuk kepentingannya sah saja, karena merupakan kodrat dari kehidupan dan merupakan tujuan dari Tuhan. Hal ini semakin menguatkan bahwa manusia memiliki status sebagai makhluk yang lebih tinggi daripada makhluk lain yang ada di bumi, dan Tuhan mempersiapkan segala sesuatu yang ada di bumi demi kepentingan manusia ((Gansmo Jakobsen, 2017, pp. 184–199)

Secara umum untuk memperbaiki kesadaran lingkungan yang kurang tersebut bisa dilakukan melalui dua cara, yakni yang pertama melalui penetapan peraturan mengenai kelestarian lingkungan (Dobson, 2007a, p. 238). Pada penerapan peraturan ini pemerintah bisa memberikan insentif bagi masyarakat yang bisa menjaga lingkungan, seperti contoh insentif yang diberikan oleh walikota surabaya yang memberikan akses bus gratis bagi warganya dengan syarat membawa botol bekas, atau insentif ekonomi lain (Aminah, 2022, p. 329; Prasetyo et al., 2019, p. 177). Di kota madiun sebenarnya hal serupa juga diterapkan dalam

bentuk bank sampah, Wali kota madiun memberikan kebijakan dan mendorong di setiap kelurahan dan sekolah untuk memiliki bank sampah sehingga sampah dapat di beli dan diganti dengan uang (Utami & Fitria Ningrum, 2020, p. 92) insentif lain di luar keuangan contohnya seperti penghargaan adiwiyata yang diterimakan kepada sekolah hijau (ADGS) (Gough et al., 2020, p. 1). Namun seperti yang dikatakan Dobson bahwa kebijakan hanya akan mengubah sementara perilaku masyarakat dan tidak bertahan lama hanya mengikuti masa berlaku insentif tersebut. Hasil yang sementara tersebut terjadi karena kesadaran lingkungan tidak menjadi karakter yang melekat erat pada diri seseorang yang diperoleh dari kesadaran penuh akan tindakanya (Dobson, 2007a, p. 234).

Kebijakan mengenai kelestarian lingkungan di Indonesia memang sudah ada, dan bahkan sudah memasukan kandungan kelestarian lingkungan pada konstitusinya. Namun hal tersebut masih di anggap kurang karena pasal yang mengatur mengenai kelestarian lingkungan kurang tegas dan terbatas, sehingga mengesankan kepentingan lingkungan menjadi di bawah kepentingan lainnya (Faiz, 2016, p. 776). Hal tersebut bisa saja menjadi lebih parah akibat adanya UU Cipta Kerja yang telah di Sah kan oleh pemerintah Indonesia, dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa potensi kerusakan lingkungan. Misalnya dalam hal pemanfaatan kawasan hutan yang sebelumnya diatur dalam UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang mengatur mekanisme perijinan hutan didalamnya terdapat 8 skema pemanfaatan hutan di sederhanakan menjadi lebih mudah. Dampak lainnya yakni hilangnya *frase* izin lingkungan dalam Undang-undang No 32 tahun 2009 yang berimplikasi bahwa analisis dampak lingkungan bukan menjadi suatu kewajiban dalam proses pembuatan ijin usaha, analisis dampak lingkungan hanya menjadi faktor pertimbangan semata. Hal ini juga semakin membuktikan bahwa kelestarian lingkungan menjadi faktor yang sering kali di kalahkan dengan berbagai faktor termasuk ekonomi (Cristiawan, 2022, pp. 45–80; Sulistyanto Luhukay, 2021, p. 101) .

Maka untuk melindungi lingkungan tidak bisa semata-mata hanya di bebaskan pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada hal lain salah satunya yakni pendidikan. Jika hanya mengandalkan peraturan untuk melindungi lingkungan maka dampaknya seperti yang diungkapkan Dobson dalam

penelitiannya di Inggris, bahwa manusia hanya akan selalu mencari celah dari peraturan, jika ada celah maka peraturan akan dilanggar dan kelestarian lingkungan kembali diabaikan, karena yang terpenting mereka tidak mendapat hukuman (Dobson, 2007b, p. 276). Untuk itu Dobson menyarankan perlunya peran pendidikan untuk memberikan penguatan terhadap berbagai peraturan lingkungan yang dibuat, sehingga memunculkan karakter/ *disposition* warga negara mengenai kecintaan lingkungan. Selain itu pendidikan dinilai tepat untuk mengatasi permasalahan lingkungan, karena permasalahan lingkungan menjadi dan multidimensional, dan berkaitan dengan berbagai aspek seperti politik, hukum, teknologi (Berkowitz et al., 2005, p. 227; Krasny et al., 2015, p. 234; Latta, 2007; Quinn et al., 2016b, p. 983). Sekolah Menengah Pertama (SMP) terutama kelas VII menjadi pilihan yang tepat karena dalam mendidik perilaku karena pada fase tersebut siswa sedang berada pada masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa peralihan tersebut tidak sedikit muncul kasus kemerosotan perilaku, untuk itu pada penelitian ini memfokuskan pada siswa SMP agar pada masa peralihan ini pendidikan untuk kelestarian lingkungan yang telah di tanamkan di fase anak-anak di Sekolah Dasar tidak terputus dan merosot (Agustiawan & Dyah Puspitasari, 2019, p. 274).

Pendidikan lingkungan pada penelitian ini di tanamkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan, karena mata pelajaran tersebut memiliki bidang kajian yang bersifat *Multifacet* dengan konteks lintas bidang keilmuan (Wahab & Sapriya, 2011) dengan objek kajian pada konsep demokrasi politik untuk hak dan kewajiban warga negara yang diharapkan mampu memunculkan penalaran kewarganegaraan (*Civic Knowledge*), Sikap kewarganegaraan (*Civic Disposition*), keterampilan kewarganegaraan (*Civic Skills*), Komitmen Kewarganegaraan (*Civic Commitment*), dan Kemampuan Kewarganegaraan (*Civic Competence*) (winatara, undin S, 2007).

*Ecological Citizenship* merupakan konsep yang dekat dan diturunkan dari sikap kewarganegaraan (*Civic Disposition*), hal ini karena *Ecological Citizenship* merupakan suatu sikap yang ditunjukkan oleh warganegara yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (Usmi & Murdiono, 2021, p. 243). Sikap tersebut terbentuk dari pengetahuan kewarganegaraan serta keterampilan kewarganegaraan mengenai lingkungan. Sehingga meskipun pada hal ini

*Ecological citizenship* merupakan konsep turunan dari *civic disposition* bukan berarti steril dari kompetensi yang lainnya yang saling bersinergi dan pada akhirnya membentuk *Ecological Citizenship*.

Terlebih pendidikan kewarganegaraan harusnya memiliki kandungan *ecological citizenship* sebagai penjelmaan hak warganegara akan kelestarian lingkungan dan kewajiban warganegara untuk dapat harmonis dengan lingkungan. Didalam buku teks yang menjadi Hal ini mengindikasikan bahwa ada ketidak optimalan pelaksanaan pembelajaran yang selama ini dilakukan. Dari data selama observasi yang di peroleh oleh peneliti menunjukkan bahwa ketidak optimalan pendidikan ini salah satu penyebabnya yakni materi pelajaran PPKn yang di bahas dalam setiap pembelajaran hanya menjadi pembahasan pada tataran akademik di sekolah dan kurang memberikan proporsi yang tepat bagi siswa untuk dapat berpartisipasi langsung dalam proses pembelajaran. Padahal pendidikan akan bisa menjadi efektif jika melibatkan tri pusat pendidikan yakni, sekolah, masyarakat, dan keluarga (Sukarman, 2017, p. 24). Selain itu metode pembelajaran yang diterapkan saat ini juga belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik siswa, yang sudah bergerak pada digitalisasi dan berbasis pada data yang kontekstual dengan kehidupan siswa. Dari hasil angket yang disebarkan peneliti menunjukan bahwa meski guru dan siswa memiliki persepsi berbeda mengenai pembelajaran, guru merasa bahwa pembelajaran yang di lakukanya telah menggunakan metode dan media yang kekinian sementara sebaliknya siswa merasa metode dan media yang digunakan guru masih terlihat usang dan kurang memberikan kesempatan siswa untuk berfikir kritis dan berpartisipasi langsung. Apalagi topik yang di jadikan bahasan terkadang merupakan topik yang lama dan tidak *up to date* sesuai dengan perkembangan permasalahan kewarganegaraan yang ada saat ini (Hasil observasi, 2021).

Guna memperkuat hasil pendidikan untuk mewujudkan kesadaran lingkungan maka pendidik perlu memikirkan karakteristik siswanya agar hasil pembelajaran dapat berhasil secara optimal. Dan saat mengingat tipe generasi peserta didik saat ini dan kondisi pasca ditetapkannya keadaan *new normal* Covid-19 ini maka pembelajaran lingkungan perlu bergerak pada digitalisasi dan optimalisasi data. Dari beberapa kajian (Akçayır & Akçayır, 2017, pp. 1–14; Briz-

Ponce et al., 2017, p. 67; Fu & Hwang, 2018, p. 65) menyimpulkan bahwa adanya teknologi juga membantu pendidikan dalam mengajarkan karakter. Sehingga dalam menumbuhkan sikap dan nilai-nilai kepedulian lingkungan, teknologi dapat menjadi solusi yang mutakhir. Terlebih lagi kita saat ini mengajar anak generasi milenial yang lebih mengedepankan Teknologi dalam berbagai aktivitasnya, maka media maupun cara mengajar guru juga perlu menyesuaikan (Considine et al., 2009, p. 471; Kotz, 2016, p. 1163).

Apalagi saat ini dalam masyarakat kini mulai marak diperbincangkan mengenai konsep *Society 5.0*/ Masyarakat 5.0. Masyarakat 5.0 adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (human-centered) dan berbasis teknologi (*technology based*). Melalui Masyarakat 5.0, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) akan mentransformasi big data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan (*the Internet of Things*) menjadi suatu kearifan baru, yang akan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia membuka peluang-peluang bagi kemanusiaan. Sementara itu, di Masyarakat 5.0, sejumlah besar informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya. Untuk itu pada disertasi ini akan mengembangkan pembelajaran yang dapat menyatukan peran siswa dan masyarakat bahkan keluarga untuk dapat terlibat secara langsung di dalam pembelajaran dengan di dukung vidio yang bersifat *virtual reality* sehingga memberikan pengalaman nyata pada siswa mengenai permasalahan yang ada tanpa harus berpindah lokasi secara fisik yang tidak di mungkinkan pada saat pandemi *Covid-19*.

Keluarga dan masyarakat dapat memberikan peranya secara langsung dalam menyumbangkan data yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi siswa yang di tampung dalam *server* dan nantinya akan menjadi big data. Melalui konsep ini siswa akan mendapati pembelajaran yang *konstekstual* dan sesuai dengan karakteristik usia siswa yang akrab dengan tehnologi. Wang menyebutkan bahwa kelebihan pemanfaatan big data ini pada pendidikan yakni dapat meningkatkan peluang untuk membuat kebijakan pendidikan lebih baik, dan analisis pendidikan (Wang, 2016, p. 381). Sehingga pada akhirnya penelitian disertasi ini diharapkan mampu menghasilkan suatu model pembelajaran yang mampu menjadi sarana mendidik ekologi pada generasi muda, yang di dalamnya

akan mengajarkan siswa untuk memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berhubungan dengan hukum, politik, filsafat bahkan sosiologis mengenai hubungan manusia dan alam dengan memanfaatkan teknologi dalam bentuk aplikasi PKN Ekologi yang memanfaatkan big data serta dapat memaksimalkan peran masyarakat, guru, dan siswa.

### **1.1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah untuk penelitian ini yakni:

1. Bagaimana gambaran kompetensi *Ecological Citizenship* dan kebutuhan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis ekologi bagi siswa di Sekolah Menengah Pertama Kota Madiun?
2. Bagaimana gambaran pengembangan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis ekologi untuk menanamkan Kompetensi *Ecological Citizenship* di SMP kota madiun?
3. Bagaimana efektivitas penerapan model dan media pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis terhadap kompetensi *ecological citizenship* siswa SMP di Kota Madiun?

### **1.1.3 Tujuan Penelitian**

Dari uraian latar belakang dan rumusan di atas maka tujuan penelitian ini yakni:

1. Mengidentifikasi Bagaimana gambaran Kompetensi *Ecological Citizenship* dan kebutuhan model dan media pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis ekologi bagi siswa di Sekolah Menengah Pertama Kota Madiun?
2. Mendeskripsikan gambaran pengembangan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Ekologi yang sesuai bagi siswa di Sekolah Menengah Pertama Kota Madiun untuk menanamkan Kompetensi *Ecological Citizenship* di kota madiun?
3. Menganalisis efektivitas penerapan model dan media pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis terhadap kompetensi *Ecological Citizenship* siswa SMP di Kota Madiun?

#### **1.1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan ada beberapa manfaat yang muncul dari berbagai segi, diantaranya sebagai berikut.

##### **Segi Teori**

1. Memperkaya teori mengenai model dan media pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan utamanya terkait dengan pembentukan kompetensi ekologi bagi siswa
2. Memperkuat kajian *ecological citizenship* di ranah persekolahan yang selama ini belum banyak di kembangkan di Indonesia
3. Memperkaya kajian mengenai *civic education* dalam penerapan model dan media kelas dan *citizenship education* dalam hal pelibatan masyarakat dalam praktik pembelajaran

##### **Segi Kebijakan**

1. Sekolah dapat membuat kebijakan untuk pembelajaran tidak sebatas di sekitar sekolah melainkan juga di lingkungan
2. Model pembelajaran ini hopefully bisa menginisiasi praktik merdeka belajar di jenjang SMP agar pembelajaran dapat memiliki pengalaman belajar di luar kelas dan sekolah

##### **Segi Praktis**

1. Mendorong guru untuk lebih memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran
2. Dapat memperkuat praktik kelestarian lingkungan di dalam Masyarakat

##### **Segi Aksi Sosial**

1. Pembelajaran dengan model dan media PKn Ekologi dapat memperkaya pengalaman hidup dengan memberikan gambaran dan mendukung adanya aksi.
2. Pembelajaran dengan model dan media PKn Ekologi dapat meningkatkan terciptanya komunitas-komunitas masyarakat pemerhati lingkungan.